



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : LUKAS SAIBA  
NIK : 9202120104650001  
Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN  
Unit Kerja : BADAN KARANTINA PERTANIAN  
Sub Unit Kerja : STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS II  
MANOKWARI  
Jabatan : KEPALA STASIUN  
Jenis Laporan : Periodik - 2022  
Tanggal Kirim : 10 Maret 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN KARANTINA PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : LUKAS SAIBA
2. Jabatan : KEPALA STASIUN
3. NHK : 280514

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	450.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.500 m2/95 m2 di KAB / KOTA MANOKWARI, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	3.500.000
1. MOTOR, HONDA NC100AIC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	900.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
Sub Total	Rp.	454.400.000
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	54.924.421
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	399.475.579

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.